

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 11, December 2023
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10338400)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10338400>

E-Government Dalam Pencatatan Stunting Melalui Aplikasi E-Penting di Puskesmas Cigondewah

Patna Akbar Pangestu¹, Endang Rahmawati², Salsa Bilkis Kuds³, Ivan Darmawan⁴
¹²³⁴*Universitas Padjadjaran*

Corresponden author: patna20001@mail.unpad.ac.id

Abstract

This article discusses the implementation of the e-Penting application in recording and reducing stunting rates in Bandung City, specifically at the Cigondewah Health Center. Stunting, which occurs in the first 1,000 days of a child's life, has long-term impacts on a child's health and development. The Bandung City Government has launched several innovations, including the e-Penting application, to address the stunting issue. The e-Penting application is the main focus of efforts to reduce stunting at the Cigondewah Health Center. Full support from the government, cross-sector coordination, and regeneration are key factors in the implementation of this application. This article also discusses the concept of e-Government as a supporter of democratic, transparent, and accountable government. The research method was conducted using an ethnographic approach, with the selection of informants through purposive sampling technique. Data were collected through in-depth interviews and non-participant observation. Data analysis adopted the Miles and Huberman model, which involved data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that although the e-Penting application is considered a positive step, there are still barriers, such as the low level of education and public awareness, as well as technical issues such as data synchronization and long inputting times. More intensive socialisation and an integrated approach with the community are needed to maximise the benefits of this application in addressing the problem.

Keywords: E-Government, Stunting, E-Penting, Puskesmas

Abstrak

Artikel ini membahas implementasi aplikasi e-Penting dalam pencatatan dan penurunan angka stunting di Kota Bandung, khususnya di Puskesmas Cigondewah. Stunting, yang terjadi pada 1.000 hari pertama kehidupan anak, memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan perkembangan anak. Pemerintah Kota Bandung telah meluncurkan beberapa inovasi, termasuk aplikasi e-Penting, untuk menangani masalah stunting. Aplikasi e-Penting menjadi fokus utama dalam upaya penurunan stunting di Puskesmas Cigondewah. Dukungan penuh dari pemerintah, koordinasi lintas sektor, dan kaderisasi menjadi faktor kunci dalam implementasi aplikasi ini. Artikel ini juga membahas konsep e-Government sebagai pendukung pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Metode penelitian dilakukan menggunakan pendekatan etnografi, dengan pemilihan informan melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi non-partisipan. Analisis data mengadopsi model Miles dan Huberman, yang melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aplikasi e-Penting dianggap sebagai langkah positif, masih terdapat hambatan, seperti rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat, serta masalah teknis seperti sinkronisasi data dan waktu penginputan yang lama. Sosialisasi yang lebih intensif dan pendekatan yang terintegrasi dengan masyarakat diperlukan untuk memaksimalkan manfaat aplikasi ini dalam menangani permasalahan stunting.

Keyword: E-Government, Stunting, E-Penting, Puskesmas

Article Info

Received date: 28 November 2023

Revised date: 3 December 2023

Accepted date: 10 December 2023

PENDAHULUAN

Stunting adalah suatu kondisi dimana pertumbuhan dan perkembangan fisik anak terganggu akibat kekurangan nutrisi yang menetap, terutama pada masa kritis perkembangan yaitu 1.000 hari pertama kehidupan, sejak konsepsi hingga usia dua tahun. Kondisi ini dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan, perkembangan kognitif, dan produktivitas

seseorang. Menurut WHO, stunting yang sering disebut sebagai keterbelakangan pertumbuhan, secara ilmiah terkait dengan malnutrisi kronis, stimulasi psikososial, dan paparan berulang terhadap penyakit menular sejak lahir hingga usia dua tahun. Selain memperlambat pertumbuhan fisik dan membuat anak lebih mudah terserang penyakit, stunting pada anak juga dapat membahayakan perkembangan kognitif serta mempengaruhi kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan. (Fajrillah, 2023)

Stunting masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia khususnya Kota Bandung, terutama dalam program kesehatan. Maka dari itu, perlu memajukan pemberdayaan TIK, termasuk mengurangi tingkat keterlambatan dengan meningkatkan efektivitas, melemahkan pendidikan, dan meningkatkan kolaborasi, serta menyediakan informasi yang valid dan andal secara terpadu.

Pencegahan serta penurunan tingkat stunting ini telah menjadi prioritas pembangunan manusia yang unggul pemerintah Kota Bandung yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) pada tahun 2018-2023. Maka dari itu, pemerintah Kota Bandung ingin mengajak kepada semua sektor pemerintah maupun masyarakat untuk berkomitmen dan bekerja sama untuk menurunkan angka stunting. Adapun beberapa inovasi yang digalakkan pemerintah Kota Bandung yang dilansir pada laman oleh (Humas Kota Bandung, 2022) demi tercapainya penurunan angka stunting, seperti yang dilansir dalam *website* resmi Pemerintah Kota Bandung, yakni :

1. Aplikasi Bandung Tanginas
2. Beas Bereum (Bekal Anak Sekolah Bergizi Enak dan Murah)
3. Rembulan (Remaja Bandung Unggul Tanpa Anemia)
4. Sigurih (Studi Intensif Gizi untuk Remaja Indonesia Hebat)
5. Buruan SAE mengenai budidaya pekarangan dan pengelolaan pangan sehat
6. Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) melalui permodalan dan peningkatan keterampilan
7. Bang Kasep (Bangga Kagungan Septictank) demi mencapai ODF 100 persen, dan
8. Aplikasi e-Penting (Elektronik Pencatatan Stunting) untuk pendataan stunting.

Dalam hal pengelolaan data stunting, pemerintah Kota Bandung turut membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang berhasil membuat suatu aplikasi yang dapat pencatatan data stunting sebagai media publikasi satu pintu yakni e-Penting (Elektronik Pencatatan Stunting). Aplikasi e-Penting (Elektronik Pencatatan Stunting) hadir untuk membantu mempermudah pemerintah dalam mengelola data terkait dengan stunting dan sebagai media publikasi data satu pintu. Aplikasi e-Penting dilaksanakan sejalan dengan konvergensi percepatan penurunan stunting yakni manajemen data serta sebagai jawaban akan tantangan mengenai pengelolaan data stunting (Humas Kota Bandung, 2022).

Peran aplikasi e-Penting bagi pemerintah diharapkan mampu membantu dalam pembuatan kebijakan strategis yang mampu menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat perihal stunting, maka dari itu, e-Penting ini juga turut dalam memuat berbagai data seperti Standar Operasional Prosedur, pengintegrasian satu data, verifikasi dan mentransformasi data ke dalam bentuk digital. Selain itu, bagi masyarakat sendiri aplikasi e-Penting ini diharapkan mampu membuka wawasan dan kesadaran akan bahaya stunting, khususnya pada keluarga yang berisiko akan stunting, calon pengantin baru, para ibu hamil dan ibu nifas (Humas Kota Bandung, 2022)

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2016 ini menyatakan bahwa Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) merupakan tingkat pertama yang bertanggung jawab akan kesehatan pada wilayah kecamatan sebagai daerah cakupannya. Selain itu, dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan upaya-upaya kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dinas kesehatan kabupaten maupun

kota, maka dari itu Puskesmas berpacu pada kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan dan telah tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Lima Tahun Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Merujuk pada keterangan di atas, dalam pencatatan stunting Puskesmas Cigondewah turut melaksanakan kebijakan yang telah tertulis dalam RPJMD Kota Bandung salah satunya ialah penggunaan aplikasi e-Penting.

Banyak permasalahan yang ada pada Puskesmas Cigondewah Kota Bandung selain penurunan stunting salah satunya yaitu pendataan untuk keperluan monitoring, dan saat ini kader PKK bekerja sama dengan Posyandu untuk pendataan bayi, anak kecil, ibu hamil dan menyusui. Namun data tersebut seringkali tidak akurat dan tidak dapat diakses secara real time karena kesalahan pengukuran atau pencatatan manual. Selain pencegahan stunting yang dapat menurunkan angka stunting di Kota Bandung, Pemerintahan juga dapat mengembangkan aplikasi pendataan dan monitoring, dengan menggencarkan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat atau edukasi serta meningkatkan kemampuan kelompok masyarakat yang terlibat diantaranya melalui keberadaan kader sebagai penggerak utama dari kegiatan di posyandu.

E-Government

E-government atau pemerintahan elektronik mengacu pada penggunaan teknologi informasi dalam seluruh kegiatan pengelolaan pemerintahan, mulai dari perencanaan dan pengorganisasian hingga pemantauan dan pengendalian pemerintahan. Sedangkan menurut Indrajit dalam Buku *E-Government: Implementasi, Strategi dan Inovasi* oleh Darmawan Napitupulu dkk (2020), e-Government merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kelompok berkepentingan lainnya, yang berbasis pada teknologi informasi (khususnya Internet) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Termasuk penggunaan Teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik meliputi G2C (*Government to Citizen*), G2B (*Government to Business*), G2G (*Government to Government*), dan G2E (*Government to Employee*).

Pengimplementasian konsep e-government oleh pemerintah Kota Bandung salah satunya ialah adanya aplikasi e-Penting. Penerapan e-government dalam pencatatan stunting ini diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis, transparansi, dan akuntabel. Adapun manfaat menurut Campo dalam (buku 1) yakni biaya administrasi lebih terjangkau, lebih cepat tanggap dalam merespon permintaan maupun keluhan dari masyarakat, mempermudah akses berbagai instansi pemerintahan, meningkatkan kapabilitas instansi pemerintah serta mendorong ekonomi lokal dengan penyediaan fasilitas antara pemerintah dengan pengusaha lokal.

Penelitian ini menggunakan teori faktor berdasarkan hasil penelitian Darmawan Napitupulu dkk dalam buku “*E-Government: Implementation, Strategy and Innovation*” karya Harvard JFK School of Government dalam Nugraha dalam (Napitupulu, et al., 2020). Untuk mencapai tata kelola yang baik, ada beberapa elemen yang mendukung keberhasilan pengembangan e-Government, antara lain:

a. Dukungan (*Support*)

Dengan dukungan kuat dari seluruh pemangku kepentingan, kami dapat mengandalkan upaya kami untuk berhasil mengoperasikan e-Government dapat direalisasikan. Namun, tanpa dukungan yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk kemauan politik, maka implementasi e-Government akan sulit berhasil. Dukungan yang diharapkan tidak hanya berupa perbincangan yang dituangkan dalam konsep dan rencana kerja tertulis, namun juga dalam bentuk tindakan nyata. Unsur pendukung ini memerlukan pertimbangan beberapa faktor untuk mencapai keberhasilan e-Government, seperti:

1. Definisi kerangka e-Government yang akan digunakan telah disepakati bersama dengan menetapkan rencana induk pengembangan e-Government. Selain itu, isi rencana induk atau rencana pokok yang disusun akan selaras dengan visi dan misi pemerintah yang telah ditetapkan sehingga kebijakan yang diambil akan tetap sejalan serta pengembangan e-Government ini dilaksanakan secara bertahap dan proporsional.
2. Pengalokasian dan analisa sumber daya manusia dan sumber daya yang ada seperti finansial, waktu, tenaga, waktu dan sumber daya lainnya yang tersedia di setiap sektor pemerintahan dengan semangat konsep lintas sektoral. Dengan menganalisis sumber daya yang tersedia dapat membantu kondisi dan permasalahan yang ada sehingga dapat dipersiapkan dan dikembangkan lebih matang.
3. Membangun infrastruktur dan lingkungan yang kondusif dalam pengembangan e-Government seperti dengan adanya peraturan perundang-undangan, standarisasi, peraturan pemerintah yang kuat dan mengikat.
4. Sosialisasi akan implementasi e-Government agar diterapkan secara konsisten, merata, menyeluruh dan berkelanjutan sehingga dapat membangun pelayanan publik yang efektif dan efisien kepada para pemangku kebijakan, masyarakat dan pihak swasta.

b. Kapasitas (*Capacity*)

Faktor kedua adalah kapasitas yang tersedia. Kapasitas yang dimaksud muncul dari kemampuan atau kekuatan pemerintah daerah dalam mewujudkan impian e-Government. Kemampuan atau kewenangan pemerintah daerah untuk mewujudkan “impian” e-Government yang relevan. Setidaknya ada tiga hal yang harus dimiliki pemerintah terkait elemen tersebut, antara lain: Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk menjalankan berbagai inisiatif e-Government, terutama yang berkaitan dengan sumber daya keuangan. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang tepat. Diperlukan juga personel yang memiliki keterampilan dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan implementasi e-Government sesuai dengan prinsip manfaat yang diharapkan.

c. Nilai (*Value*)

Elemen yang menentukan seberapa nilai manfaat yang diperoleh, disini masyarakat sebagai pengguna sistem, bukan pemerintah sebagai pengembang dan penyedia sistem, yang menentukan sejauh mana nilai guna dapat dicapai. Jika tidak ada partai politik yang merasa mendapat manfaat dari keberadaan e-Government, maka seluruh rencana pengembangan dan penerapan e-Government akan sia-sia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode etnografi sebagai pendekatan utama, yang didefinisikan sebagai gambaran umum suatu budaya berdasarkan informasi dari penelitian lapangan. Tahapan metode ini mencakup pemilihan masyarakat sebagai objek penelitian, penemuan dan pengumpulan data, penyusunan rencana penelitian, pengecekan validitas data, dan penjelasan serta pamitan ke lapangan.

Dalam pemilihan informan, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan informan utama dari pihak puskesmas dan Masyarakat setempat, teknik pengumpulan data melibatkan wawancara mendalam dan observasi non-partisipan. Metode observasi non-partisipan digunakan untuk mengamati kegiatan masyarakat tanpa terlibat langsung dalam kegiatan tersebut.

Analisis data mengadopsi model Miles dan Huberman, yang melibatkan reduksi data, penyajian data melalui berbagai bentuk seperti uraian singkat, dan penarikan simpulan serta verifikasi. Dua model yang digunakan adalah model alir, di mana kegiatan analisis dilakukan

secara bersamaan, dan model interaktif, di mana reduksi data dan penyajian data memperhatikan hasil data yang dikumpulkan. Metode penelitian ini memberikan dasar yang komprehensif dan terstruktur dalam mengumpulkan, menganalisis, dan memastikan keabsahan data untuk menjawab tujuan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dalam menganalisis menggunakan hasil riset dari *Harvard JFK School of Government* dalam (Napitupulu, et al., 2020) yang berpendapat terdapat tiga elemen yang menentukan suksesnya sebuah e-Government dijalankan. Berikut merupakan hasil analisis dan riset mengenai pencatatan stunting dalam aplikasi e-Penting, yaitu :

1. Support

Dukungan pemerintahan dalam penerapan aplikasi e-Penting termasuk ke dalam program prioritas kota Bandung dengan mewajibkan seluruh instansi terutama instansi kesehatan untuk menggunakan aplikasi e-Penting ini dalam pencatatan stunting yang diusung Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bandung. Selain itu, terdapat dukungan dari pemerintah pusat mengenai pencatatan stunting berupa e-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) yang sudah terlebih dahulu dijalankan sehingga e-Penting dapat selaras dan sinkronisasi data dengan e-PPGBM, Puskesmas melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan dan kelurahan satu bulan satu kali, pihak Puskesmas pun telah meminta bantuan kepada pemerintah kecamatan perihal IT agar sumber daya manusia di pihak puskesmas dan kader lebih mengerti akan penggunaan e-penting sebab, tingkat stunting di Puskesmas Cigondewah selalu mendapat peringkat rendah dalam mencapai target.

Terdapat Lokakarya Mini (Lokmin) dijalankan setiap triwulan atau tiga bulan sekali bekerja sama lintas sektor seperti Dinas Kesehatan untuk publikasi data stunting serta membahas mengenai kaderisasi kelurahan dan capaian target dan Lokakarya Bulanan (Lokbul) dijalankan satu bulan sekali oleh internal. Kader ini dibedakan menjadi tiga bagian yakni purwa, madya dan utama. Terdapat kompetensi atau indikator untuk menilai apakah kader tersebut layak atau memiliki kualitas seperti dalam cakupan administrasi mengenai buku posyandu, pemahaman terkait pengukuran bayi, dan lain-lain. Mengenai rencana pengimplemtasian kegiatan sejalan dengan peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2014 tentang Manajemen Puskesmas maka (Rencana Pelaksana Kegiatan (RPK) disusun pada bulan Desember yang direncanakan 2 tahun sebelum tahun pelaksanaan, lalu dilanjutkan dengan sosialisasi RPK, bantuan kewilayahan dan terakhir evaluasi RPK yang telah terlaksana. Menjadi penunjang dalam implementasi e-Government yakni sosialisasi, sosialisasi ini dilakukan oleh Puskesmas Cigondewah dalam penerapan e-Penting ini yaitu dengan kunjungan kepada tiap posyandu yang terdapat di kelurahan, sosialisasi kepada tim PKK kelurahan dan penyuluhan pematerian ke setiap sekolah-sekolah mengenai bahaya stunting dan pentingnya perbaikan gizi.

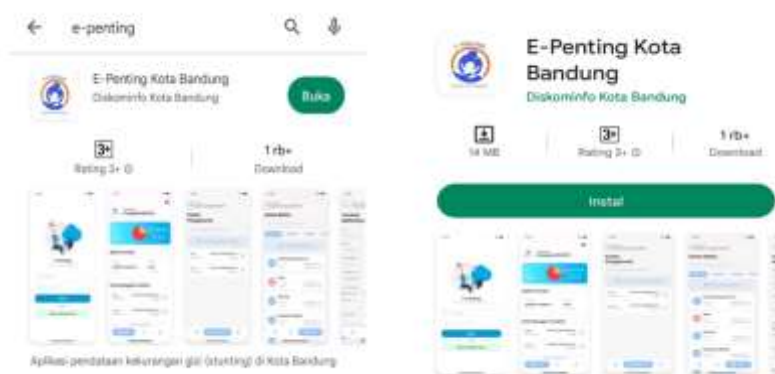
Dukungan yang berupa dasar hukum maupun peraturan pemerintah lainnya yang jelas menjadi fondasi hukum dalam penerapan aplikasi e-Penting :

1. Peraturan Menteri No. 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Percepatan Stunting (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 tentang Pembangunan Manusia yang Unggul dan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Cigondewah No. 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Tim Teknis Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di UPTD Puskesmas Cigondewah
11. Keputusan Lurah Cigondewah Kaler No. 4 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Kelurahan Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung

2. Capacity

Aplikasi E-Penting ini merupakan aplikasi gratis yang dapat diunduh melalui android di Playstore E-Penting Kota Bandung <https://e-penting.bandung.go.id>



Gambar 1.1 Aplikasi e-Penting dalam *Playstore*

Pengalokasian sumber daya manusia di Puskesmas Cigondewah kurang seperti kekurangan sumber daya nutrisionis di mana idealnya setiap kelurahan memiliki satu nutrisionis untuk membantu pengukuran gizi anak tetapi pada faktanya seorang nutrisionis memegang tiga kelurahan secara bersamaan, dan masih banyak pegawai senior yang hampir memasuki pensiun beberapa sama sekali tidak bisa mengoperasikan komputer, selain itu terdapat beberapa kader dan perangkat Puskesmas yang belum bisa dalam penggunaan teknologi. Adapun Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Cigondewah tentang penetapan tim teknis percepatan penurunan dan sekaligus pencatatan stunting, yakni :

Tabel 1. Tim Percepatan Penurunan Stunting Puskesmas Cigondewah

No.	Nama	Jabatan	Kelompok
1.	dr. Dwi Nur Hidayati	Kepala Puskesmas	Penanggungjawab percepatan penurunan stunting Puskesmas Cigondewah
2.	Siti Suminar, Amd. Gz	Nutrisionis	Ketua Koordinator
3.	Rima Mahmudah, S.Tr.Kes	Promkes	Administrasi
4.	Indrianti Windaningsih, Amd. Keb	Bidan	Bidan Koordinator KIA-KB

5.	Rinrin Nopiarani, S.Kep	Perawat	Perawat Koordinator TB
6.	Eva Rahmaya Dewi, S.Kep., Ners	Perawat	Perawat Koordinator Perkesmas
7.	Larasati Prastika Dewi	Sanitarian	Sanitarian Koordinator Kesling

Mengenai Tim Teknis Percepatan Penurunan Stunting di Puskesmas Cigondewah menurut surat keputusan kepala UPTD, Puskesmas Cigondewah dalam tugasnya melakukan koordinasi dengan lintas sektor seperti kecamatan dan kelurahan, memastikan bahwa kegiatan percepatan penurunan stunting berjalan lancar dan turut dalam mendampingi keluarga berisiko stunting dalam pelayanan kesehatan, membuat rujukan bagi kelompok sasaran penurunan stunting dan membuat laporan bulanan terkait penurunan stunting.

Pihak Puskesmas bekerjasama dengan kader posyandu dalam kegiatan penentuan dan penjarangan data balita stunting, pengidentifikasian data sasaran balita stunting, koordinasi lintas program (LP) dan lintas sektor (LS), mempersiapkan alat dan bahan, melaksanakan kegiatan pengukuran tinggi badan (TB) dan berat badan (BB), melakukan penilaian status gizi dengan indikator, pengupayaan penanggulangan stunting dan pendokumentasian kegiatan serta dalam penginputan data pada aplikasi e-Penting turut mendapat bantuan dari kader.

C. Value

Mengenai aplikasi e-Penting ini masih awam di kalangan masyarakat sebab aplikasi ini baru satu tahun di rilis yakni pada Oktober 2022 maka dari itu manfaat yang baru dirasakan oleh pemerintah dan pihak Puskesmas saja dalam manajemen data. Hal ini masih menjadi tugas bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi lebih lanjut agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari adanya aplikasi e-Penting. Dalam penginputan data masyarakat masih dibantu oleh kader-kader posyandu, kader diharapkan dapat berperan aktif dalam kegiatan promotif dan preventif sehingga pengetahuan kader terhadap masalah maupun solusi merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki supaya dapat memberikan pelayanan yang optimal dalam rangka pencatatan angka stunting. Agar hal tersebut dapat tercapai dengan efektif maka perlu penyediaan informasi yang valid dan reliabel secara terintegrasi melalui media aplikasi dimana masyarakat dapat secara aktif berkolaborasi dan ikut serta menjadi relawan dalam mengedukasi masyarakat dan menyampaikan informasi-informasi penting.

Hasil wawancara bersama Bapak Aji Padilah dan Ibu Yuniar Susilowati penerapan e-Government ini beberapa hambatan dan kendala salah satunya yakni kebudayaan dan kebiasaan masyarakat kurang mendukung seperti halnya masih terdapat senioritas dalam kaderisasi di posyandu serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk mendapatkan gizi yang seimbang, masyarakat seringkali melakukan pengabaian ketika sosialisasi dilaksanakan seperti ketika pihak Puskesmas meminta partisipasi masyarakat untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi tetapi hanya beberapa masyarakat saja yang turut menghadiri kegiatan tersebut. Selain itu, masyarakat di kawasan kelurahan Cigondewah memiliki tingkat pendidikan yang mendasar saja sehingga masyarakat belum mampu dalam mengaplikasikan program e-Penting.

Hambatan lain dalam penerapan e-Penting ini diantaranya tidak sinkronnya data terkait berat badan dan tinggi badan bayi yang diinput secara manual oleh kader dengan data yang ada pada aplikasi e-Penting, dalam proses penginputan data seperti data bayi membutuhkan waktu yang cukup lama, terdapat perbedaan persepsi standar mengenai stunting yang berasal dari *World Health Organization* (WHO) dengan Dinas Kesehatan, sinkronisasi kewilayahan dirasa masih kurang, terdapat *miss data*, dan pada kaderisasi

terdapat perubahan di mana setiap pergantian ketua rukun warga maka kaderisasi posyandu pun turut berubah hal ini tentunya menjadi hambatan ketika harus mensosialisasikan dari awal kepada kader yang baru. Capaian target dirasa cukup tinggi sebab jumlah DPS (Datang per Sasaran) tidak seimbang juga data yang akan diekspor ke dalam e-PPGBM yang dijadikan sebagai capaian target ini merupakan data yang berusia lima tahun keatas maka target yang dicapai tidak terpenuhi dan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hal yang sudah dibahas peneliti menarik kesimpulan bahwa implementasi aplikasi e-Penting dalam penanganan stunting di Puskesmas Cigondewah merupakan langkah positif pemerintah Kota Bandung. Dukungan penuh pemerintah, koordinasi lintas sektor, dan kaderisasi menjadi faktor kunci dalam menjalankan aplikasi ini. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hambatan seperti rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan kendala teknis.

Dalam mengatasi tantangan tersebut, perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, memberikan pelatihan teknologi, dan meningkatkan koordinasi antarinstansi terkait. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi e-Penting dapat menjadi lebih efektif dalam menurunkan angka stunting di Kota Bandung, menciptakan pemerintahan yang transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Maka dari itu terdapat beberapa saran yang dapat peneliti uraikan sebagai berikut :

1. Intensifikasi Sosialisasi: Diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat mengenai aplikasi e-Penting dan pentingnya pencatatan stunting. Sosialisasi yang lebih intensif dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti pertemuan kelurahan, kegiatan posyandu, dan program edukasi di sekolah-sekolah.
2. Pengembangan Keterampilan Teknologi: Perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan lebih lanjut terhadap kader dan pegawai puskesmas yang belum terampil dalam penggunaan teknologi. Ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam penginputan data dan memastikan keakuratan informasi yang tercatat dalam aplikasi e-Penting.
3. Koordinasi yang Lebih Efektif: Peningkatan koordinasi antara Puskesmas, kecamatan, dan kelurahan perlu ditingkatkan untuk memastikan sinkronisasi data dan pencapaian target yang lebih baik. Keterlibatan aktif dari semua pihak terkait akan membantu mempercepat proses penurunan angka stunting.
4. Penyediaan Informasi yang Lebih Terpadu: Aplikasi e-Penting dapat diperkaya dengan penyediaan informasi yang lebih terpadu, termasuk panduan gizi, tips perawatan anak, dan informasi kesehatan lainnya. Hal ini dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan meningkatkan partisipasi dalam penggunaan aplikasi.

Referensi

- Fajrillah, A. A. N., Fauzi, R., Alam, E. N., & Dewi, F. (2023). Pengembangan Platform Edukasi dan Kolaborasi Sebagai Salah Satu Upaya Penurunan Angka Stunting Kota Bandung. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(5), 621-628.
- Humas Kota Bandung. (2022, Juli 6). *Aksi Pemkot Bandung Turunkan Angka Stunting*. Diambil kembali dari [bandung.go.id: https://www.bandung.go.id/news/read/6649/aksi-pemkot-bandung-turunkan-angka-stunting](https://www.bandung.go.id/news/read/6649/aksi-pemkot-bandung-turunkan-angka-stunting)
- Humas Kota Bandung. (2022, Oktober 20). *Aplikasi e- Penting Permudah Tata Kelola Data Stunting*. Diambil kembali dari [bandung.go.id:](https://www.bandung.go.id)

<https://www.bandung.go.id/news/read/7154/aplikasi-e-penting-permudah-tata-kelola-data-stunting>

Humas Kota Bandung. (2022, November 30). *Dinkes Kota Bandung Luncurkan E-Penting, Langkah Cepat untuk Intervensi Stunting*. Diambil kembali dari [bandung.go.id: https://www.bandung.go.id/news/read/7323/dinkes-kota-bandung-luncurkan-e-penting-langkah-cepat-untuk-intervens](https://www.bandung.go.id/news/read/7323/dinkes-kota-bandung-luncurkan-e-penting-langkah-cepat-untuk-intervens)

Napitupulu, D., Lubis, M. R., Revida, E., Putra, S. H., Saputra, S., Jamaludin, . . . Simarmata, J. (2020). *E-Governemt : Implementasi, Strategi dan Inovasi*. Medan: Yayasan Kita Menulis.